

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AR YANG TANPA HAK
MEMBUBUHKAN TANDA SNI ATAS PRODUK PUPUK YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Nama: Januar Christian Dicky Saputra
Jurusan/Program Studi: Hukum/ Ilmu Hukum
Pembimbing: 1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Standardisasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan SNI diwajibkan mencantumkan tanda SNI. Penerapan tanda SNI produk dapat membantu meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk digunakan. Salah satu barang yang wajib dalam penerapan tanda SNI adalah pupuk anorganik. Pada kenyataannya dewasa ini masih terdapat pelaku usaha yang berbuat curang dengan mencantumkan tanda SNI pada kemasan produk secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang tanpa hak mencantumkan tanda SNI pada kemasan produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tanpa hak membubuhkan tanda SNI pada kemasan suatu produk telah melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kata kunci: Standar Nasional Indonesia, Sertifikasi SNI, Tanda SNI, Tindak Pidana Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AR YANG TANPA HAK
MEMBUBUHKAN TANDA SNI ATAS PRODUK PUPUK YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Name: Januar Christian Dicky Saputra
Dicipline/Study Programme: Law/Law
Contributor: 1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Standardization is a tool that can be used to improve quality, production efficiency, facilitate trade transactions, and realize fair and transparent business competition. For products that have met the requirements of SNI that require the SNI mark. The application of the product SNI mark can help the public that the product is safe, efficient and good to use. One of the mandatory items in the application of the SNI mark is inorganic fertilizer. In fact today there are still business actors who cheat by illegally using the SNI mark on product packaging. This study aims to determine the form of criminal liability that can be imposed on business actors without knowing the SNI mark on the product packaging. The method used in this research is normative juridical, namely research to find solutions to legal problems faced by finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines that are relevant to the subject matter of the law. This study uses 2 (two) problem approaches, including the legal approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that the act without the right to affix the SNI mark on the packaging of a product has violated Article 26 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Therefore, business actors that commit such crimes may be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 68 of Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment.

Keywords: *Indonesian National Standard, SNI Certification, SNI Mark, Standardization Crime and Conformity Assessment*